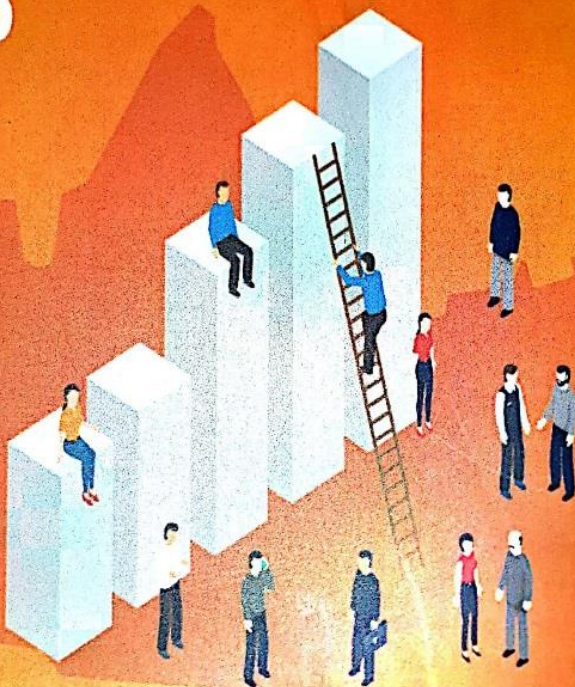


Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta 2018



KERJASAMA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN

DENGAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PUSAT STUDI KEPENDUDUKAN DAN KEBUJAKAN



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta Tahun 2018

Kerja sama

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

Dengan

Pemerintah Kota Yogyakarta

Yogyakarta
2019

Tim Penyusun

Triyastuti Setianingrum, S.I.P., M.Sc.

Dr. Agus Joko Pitoyo, M.A.

Eddy Kiswanto, S.Si. M.Si.

Darmastuti Arum Sekarini. S.I.P.

Endang Sunar S.Si.

Ig. Trihastono, S.Sos., M.M.

Affrio Sunarno, S.Sos.

Tutiek Susiatun, S.P.T.

Dian Astuti, S.I.P., M.Si.

Desy Ratnaningrum, S.Si.

Kata Pengantar

Buku statistik sektoral untuk Analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta merupakan buku yang berisi mengenai gambaran perkembangan pembangunan manusia di Kota Yogyakarta beserta dengan aspek-aspek yang mempengaruhinya. Buku ini juga berisi tentang indikator-indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia seperti indikator komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan juga pendapatan yang disesuaikan dengan pengeluaran (daya beli).

Buku ini diharapkan memberikan gambaran terhadap kondisi sumber daya manusia di Kota Yogyakarta. Selain itu, buku ini nantinya juga dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengambilan kebijakan dalam hal pembangunan manusia khususnya di Kota Yogyakarta.

Tidak lupa kami menyampaikan terima kasih diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi pembangunan manusia di masa mendatang.

Yogyakarta, Desember 2019

Kepala PSKK UGM,

Dr. Agus Joko Pitoyo, S.Si., M.A.

Daftar Isi

Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Akronim	xv
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Konsep Pembangunan Manusia.....	1
1.2 Pembangunan Manusia di Indonesia	4
1.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia.....	5
1.4 Tujuan penulisan	6
1.5 Sumber Data.....	6
Bab 2 Gambaran Umum Kota Yogyakarta	Error! Bookmark not defined.
2.1 Karakteristik Wilayah.....	7
2.2 Karakteristik Penduduk	8
2.3 Pendidikan	10
2.4 Kesehatan	13

2.5	Perekonomian	14
Bab 3	IPM Kota Yogyakarta	19
3.1	Perkembangan IPM Daerah Istimewa Yogyakarta	19
3.2	Perkembangan IPM Kota Yogyakarta	20
3.2.1	Komponen Kesehatan di Kota Yogyakarta.....	26
3.2.2	Komponen Pendidikan di Kota Yogyakarta.....	31
3.2.3	Komponen Pengeluaran (Daya Beli).....	34
3.3	Faktor Pendukung IPM	37
Bab 4	Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan	39
	Daftar Pustaka	43

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Kepadatan Penduduk DIY Tahun 2018	8
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2000-2018	9
Tabel 2.3	Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas di Kota Yogyakarta, 2016/2017-2017-2018.....	11
Tabel 2.4	Jumlah Dokter di Kota Yogyakarta Tahun 2019	14
Tabel 2.5	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	15
Tabel 3.1	Tabel Jumlah Fasilitas kesehatan DIY tahun 2018.....	29
Tabel 3.2	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2018	31

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Jumlah Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2018	10
Gambar 2.2	Angka Partisipasi Sekolah kota Yogyakarta tahun 2011-2018	12
Gambar 2.3	Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2011-2018	17
Gambar 3.1	IPM DIY Tahun 2010-2018	20
Gambar 3.2	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Persen) 2012-2018	21
Gambar 3.3	10 besar IPM tertinggi kecamatan se-DIY tahun 2018	22
Gambar 3.4	Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru per-Kecamatan tahun 2018	23
Gambar 3.5	Sebaran Kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB, dan Malaria menurut Kecamatan Kota Yogyakarta 2018	24
Gambar 3.6	Persebaran Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Klinik/Balai Kesehatan di Kota Yogyakarta 2018	26

Gambar 3.7	Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY.....	27
Gambar 3.8	Perkembangan Angka Berat Badan Bayi Lahir Rendah Kota Yogyakarta 2012-2018.....	28
Gambar 3.9	Perkembangan Angka Bayi Gizi Buruk Kota Yogyakarta 2012-2018	28
Gambar 3.10	Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta 2010-2018	32
Gambar 3.11	Gambar Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta 2010-2018	33
Gambar 3.12	Pengeluaran Perkapita Riil Sebulan yang Disesuaikan (PPP) menurut Kabupaten/Kota di DIY 2018	35
Gambar 3.13	Pengeluaran Perkapita Riil Sebulan yang Disesuaikan (PPP) tahun 2010-2018 Kota Yogyakarta	36

Daftar Akronim

AHH	:	Angka Harapan Hidup
AIDS	:	<i>Acquired Immuno Deficiency Syndrome</i>
AMH	:	Angka Melek Huruf
APK	:	Angka Partisipasi Kasar
APS	:	Angka Partisipasi Sekolah
BBLR	:	Berat Badan Bayi Lahir Rendah
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BSM	:	Bantuan Siswa Miskin
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBD	:	Demam Berdarah Dengue
DIY	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
HDR	:	<i>Human Development Report</i>

HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HLS	: Harapan Lama Sekolah
IKM	: Industri Kecil Menengah
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KKS	: Kartu Keluarga Sejahtera
KMS	: Kartu Menuju Sejahtera
KPS	: Kartu Perlindungan Sosial
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTs	: Madrasah Tsanawiyah
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PKH	: Program Keluarga Harapan
PNB	: Produk Nasional Bruto
Pokdarwis	: Kelompok Sadar Wisata
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
PPP	: <i>Purchasing Power Parity</i>
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Puskestu	: Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu

- RA : Raudatul Athfal
- RLS : Rata-rata Lama Sekolah
- RS : Rumah Sakit
- SD : Sekolah Dasar
- SMA : Sekolah Menengah Atas
- SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
- SMP : Sekolah Menengah Pertama
- Susenas : Survey Sosial Ekonomi Nasional
- TB : Tuberkulosis
- TK : Taman Kanak-kanak
- UNDP : *United Nations Development Programme*

1 Pendahuluan

1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Manusia merupakan aset bagi suatu bangsa. Manusia tidak lagi sebagai faktor produksi, melainkan merupakan aset, sehingga harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya, agar dapat dijadikan sebagai penggerak keberlangsungan suatu negara. Peningkatan dan pemeliharaan kualitas manusia, tentunya harus dilakukan dengan proses yang komprehensif. Salah satu bentuk upaya peningkatan dan pemeliharaan manusia dapat dilakukan dengan pembangunan manusia itu sendiri.

Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan manusia. Gagasan yang dikemukakan dalam *Human Development Report* ini menjadi dasar dalam implementasi pembangunan manusia. Manusia di dalam memenuhi kebutuhan untuk berkembang memiliki beberapa pilihan yang meliputi kelangsungan hidup serta hidup sehat, memperoleh pendidikan, serta akses untuk memperoleh kehidupan yang layak. Pilihan-pilihan tersebut dapat diperoleh melalui proses pembangunan. Proses pembangunan diharapkan dapat mewujudkan keadaan atau lingkungan yang memungkinkan manusia untuk memenuhi ketiga pilihan tersebut. Pencapaiannya sangat tergantung pada empat hal pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan (*Human Development Report* UNDP, 1990).

Dalam laporan tahunan yang diterbitkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia dilihat sebagai proses yang kompleks dan komprehensif. Pembangunan manusia tidak hanya dilihat atau diukur dengan besaran *income* yang diperoleh manusia tersebut, akan tetapi juga meliputi dimensi lain seperti harapan hidup serta kemudahan dalam memperoleh kehidupan yang layak. Dengan kata lain, pembangunan manusia haruslah memperhatikan aspek perbaikan kualitas kehidupan manusia itu sendiri.

Gagasan tersebut juga didukung dengan pemikiran mengenai pembangunan yang dikemukakan oleh Todaro dan Smith (2006:22) dimana pembangunan seharusnya mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material dan spiritual. Pembangunan dalam konteks ini diartikan sebagai upaya menyeluruh yang dapat mengubah kehidupan manusia itu sendiri menjadi ke arah yang lebih baik. Pandangan ini mendefinisikan pembangunan jauh lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dimaknai sebagai proses perubahan kualitas hidup manusia menjadi lebih baik, yang tidak hanya dilihat dari segi ekonomi tetapi juga kualitas diri manusia itu sendiri.

Pembangunan manusia menurut Tjokrowinoto, merupakan hal yang penting dan memiliki posisi sentral dalam mewujudkan kinerja pembangunan. Pengembangan sumber daya manusia harus dapat membentuk manusia yang mempunyai kemampuan kritis untuk melihat kendala-kendala sosial, ekonomi, politik, kultural, dan sebagainya dari sistem yang ada, dan mencari alternatif-alternatif pemecahan (2007:29). Dari sini dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia haruslah dapat memberikan nilai tambah pada manusia itu sendiri. Manusia

diharapkan dapat memiliki daya untuk menghadapi segala dinamika dalam proses hidupnya.

Sementara itu, menurut Mahi dan Trigunarso, definisi pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah (*valid*) bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik (2017:29). Dengan kata lain, pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pembangunan juga dilihat sebagai proses yang kompleks dimana terdapat beberapa aspek yang terkait dengan pembangunan dan dapat mempengaruhi proses pembangunan. Di samping itu, tujuan dari pembangunan adalah untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin. Pembangunan menitikberatkan pada kemandirian dan kesejahteraan manusia sebagai bagian dari bangsa itu sendiri.

Dalam *Human Development Report* yang diterbitkan oleh UNDP tahun 1990, pembangunan manusia menitikberatkan pada 3 elemen kehidupan, antara lain harapan hidup, pengetahuan, dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Pada elemen harapan hidup atau *longevity* terdiri dari aspek nutrisi yang cukup atau memadai serta kondisi kesehatan yang baik dari manusia itu sendiri. Elemen kedua adalah pengetahuan, dimana pembangunan juga dilihat dari kemudahan dalam mengakses pendidikan. Elemen ketiga adalah ketersediaan pemenuhan kebutuhan hidup layak yang meliputi berbagai macam aspek seperti akses tempat tinggal, *income* (pemasukan), dan sumber daya lainnya. Untuk mencapai pembangunan manusia yang komprehensif, UNDP telah merumuskan beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman dalam menilai proses pembangunan manusia di dalam suatu negara. Indikator tersebut kemudian dikenal dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia.

Terdapat klasifikasi penilaian IPM yang telah ditentukan oleh UNDP. Klasifikasi yang dapat mencerminkan kondisi pembangunan manusia di suatu wilayah tersebut antara lain: Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$; Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$; Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$; serta Kelompok “rendah”: $IPM < 60$.

1.2 Pembangunan Manusia di Indonesia

Berdasarkan pandangan UNDP mengenai IPM yang dijelaskan dalam HDR (*Human Development Report*) tersebut kemudian dijadikan dasar untuk menilai implementasi pembangunan manusia di Indonesia. Sesuai dengan paradigma pembangunan manusia yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembangunan manusia seharusnya meliputi peningkatan kualitas hidup manusia secara menyeluruh, dan tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi saja. Hal ini didukung juga dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang berisi mengenai kebebasan dalam hal pemenuhan kebutuhan dan mendapatkan kehidupan yang layak. Pemikiran ini menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia harus memiliki jaminan untuk mendapatkan hidup yang layak. Dengan kata lain, upaya-upaya pembangunan manusia, menjadi suatu keharusan untuk menjamin hak-hak warga negara Indonesia sendiri dalam memenuhi kebutuhannya.

Indeks Pembangunan Manusia mulai diperkenalkan pada tahun 1990 oleh UNDP. Sementara di Indonesia Indeks Pembangunan Manusia sejak tahun 1996 mulai diterapkan sampai level provinsi dan kabupaten/kota. Seperti yang telah dipaparkan dalam HDR (*Human Development Report*) 1990, terdapat beberapa indikator yang dijadikan acuan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Beberapa elemen

yang menjadi perhatian antara lain harapan hidup yang diukur menggunakan indikator angka harapan hidup penduduk pada saat lahir. Kemudian elemen pendidikan/pengetahuan yang diukur dengan dua indikator, antara lain angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah penduduk berusia kerja. Ketiga, elemen standar kehidupan yang layak diukur menggunakan indikator pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (*Purchasing Power Parity/PPP*) di wilayah yang bersangkutan. Seiring berjalannya waktu, metode penghitungan IPM dan indikator penyusunnya telah beberapa kali mengalami perubahan. Indikator-indikator tersebut mulai digunakan dalam penghitungan IPM provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia menggunakan metode baru sejak tahun 2010.

1.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Beberapa manfaat dari penulisan buku IPM antara lain:

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

1.4 Tujuan penulisan

Tujuan dari penulisan buku Statistik IPM Kota Yogyakarta tahun 2018 ini antara lain adalah:

1. Mengetahui perkembangan IPM di Kota Yogyakarta di tahun 2018.
2. Memberikan masukan terhadap langkah kebijakakan dalam hal Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta.

1.5 Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data dari BPS berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2018 dan Sensus Penduduk 2010. Disamping itu, data sekunder juga berasal dari data instansi pemerintah terkait, seperti data dari Dinas Pendidikan dan dari Dinas Kesehatan yang terangkum dalam publikasi Kota Yogyakarta Dalam Angka 2019.

2 Gambaran Umum Kota Yogyakarta

2.1 Karakteristik Wilayah

Kota Yogyakarta merupakan ibukota provinsi dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis Kota Yogyakarta terletak antara $110^{\circ}24'19''$ - $110^{\circ}28'53''$ Bujur Timur dan antara $07^{\circ}15'24''$ - $07^{\circ}49'26''$ Lintang Selatan. Kota Yogyakarta memiliki ketinggian sekitar 112 m dpl. Kota Yogyakarta memiliki luas sekitar 32,5 Km² atau 1,02 persen dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta di sisi utara, sisi barat, dan sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Sleman. Sementara itu, di sisi selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul. Kota Yogyakarta sendiri dialiri oleh beberapa sungai di berbagai sisi, antara lain Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur, Sungai Code di Bagian tengah, dan Sungai Winongo di bagian barat.

Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Kecamatan yang menjadi bagian dari Kota Yogyakarta antara lain Mantrijeron, Kraton, Mergangsan, Umbulharjo, Kotagede, Gondokusuman, Danurejan, Pakualaman, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Gedongtengen, Jetis, dan Tegalrejo. Dari ke-14 kecamatan tersebut, kecamatan Umbulharjo memiliki luas wilayah serta jumlah penduduk terbanyak.

Karakteristik Kota Yogyakarta yang padat penduduk serta memiliki fasilitas yang lebih baik dibanding dengan kabupaten

lainnya dan menjadikan Kota Yogyakarta sebagai kawasan yang padat penduduk. Di sisi lain, Kota Yogyakarta yang memiliki banyak penduduk rupanya juga didorong dengan banyak pendatang dari luar provinsi atau bahkan dari luar Pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena posisi Kota Yogyakarta sendiri sebagai kota pelajar, dimana terdapat beberapa universitas yang terletak dekat dengan Kota Yogyakarta itu sendiri. Sehingga, memungkinkan Kota Yogyakarta banyak dimasuki pendatang untuk menempuh pendidikan maupun bekerja dan tinggal di Kota Yogyakarta.

2.2 Karakteristik Penduduk

Kota Yogyakarta adalah kota terpadat penduduk dibandingkan dengan keempat kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai ibukota provinsi dan memiliki luas wilayah yang kecil dibanding dengan kabupaten lain di DIY, menjadi wajar jika Kota Yogyakarta memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di DIY.

Tabel 2.1 Kepadatan Penduduk DIY Tahun 2018

Kabupaten/ Kota	Laki-laki	Perem- puan	Jumlah	Kepadatan penduduk (jiwa/ km ²)	Laju pertum- buhan 2010(%)
Kulon Progo	209.600	216.158	425.758	726	1,12
Bantul	498.836	507.856	1.006.692	1.986	1,23
Gunung kidul	355.282	380.928	736.210	496	1,07
Sleman	608.968	597.746	1.206.714	2.099	1,22
Yogyakarta	208.792	218.706	427.498	13.154	1,18
DI. Yogyakarta	1.881.478	1.921.394	3.802.872	1.194	1,18

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2019

Meskipun dari segi jumlah, penduduk di Kota Yogyakarta masih lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk di Kabupaten

Sleman, yaitu sebesar 427.498. Kota Yogyakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 427.498 memiliki jumlah penduduk wanita lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki-laki.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta Tahun 2000-2018

Kecamatan	Penduduk (ribu)		
	2000	2010	2018
Mantrijeron	32.557	31.267	33.688
Kraton	19.778	17.471	17.575
Mergangsan	31.378	29.292	30.836
Umbulharjo	69.629	76.743	92.867
Kotagede	27.900	31.152	37.937
Gondokusuman	48.454	45.293	47.731
Danurejan	19.755	18.342	19.223
Pakualaman	10.593	9.316	9.336
Gondomanan	13.874	13.029	13.781
Ngampilan	17.557	16.320	17.117
Wirobrajan	26.632	24.840	26.134
Gedongtengen	17.857	17.185	18.546
Jetis	25.959	23.454	24.036
Tegalrejo	35.148	34.923	38.691
Kota Yogyakarta	396.711	388.627	427.498

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2019

Penduduk Kota Yogyakarta menyebar di 14 kecamatan. Dari 14 kecamatan yang terdapat di Kota Yogyakarta, kecamatan yang

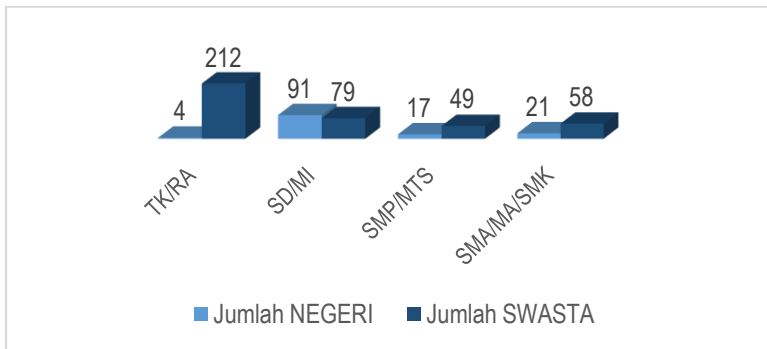
memiliki jumlah penduduk terbanyak di tahun 2018 adalah kecamatan Umbulharjo, yaitu sebesar 92.867.

Dibandingkan dengan kecamatan lain, Kecamatan Umbulharjo yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Yogyakarta, hal ini merupakan perubahan jumlah yang signifikan sejak tahun 2000.

2.3 Pendidikan

Posisi Kota Yogyakarta sebagai kota pelajar menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat lain yang bukan berasal dari Kota Yogyakarta. Banyak pendatang yang memilih Kota Yogyakarta sebagai tempat untuk menempuh pendidikan, baik yang berasal dari DIY maupun dari luar provinsi atau juga dari luar Pulau Jawa.

Gambar 2.1 Jumlah Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2018



Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2019

Kondisi tersebut, perlu didukung dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Di Kota Yogyakarta sendiri sudah banyak lembaga pendidikan formal yang tersedia baik dari sektor publik maupun sektor privat (swasta).

Jumlah sekolah di Kota Yogyakarta tahun 2018 masih didominasi oleh sektor swasta, mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas. Jumlah sekolah di jenjang Taman Kanak-kanak dari sektor publik (sekolah Negeri) sebanyak 4 sekolah, sementara sekolah swasta jauh lebih banyak, yaitu 212 sekolah. Sementara itu, di jenjang Sekolah Dasar (SD) jumlah sekolah swasta juga lebih banyak dibanding negeri, yaitu sebanyak 91 sekolah swasta dan 79 sekolah negeri. Sama halnya dengan jumlah sekolah SMP/MTS maupun SMA/MA/SMK, jumlah sekolah swasta di kota Yogyakarta juga masih lebih banyak dibanding dengan jumlah sekolah negeri.

Tabel 2.3 Rasio Murid-Guru dan Rasio Murid-Kelas di Kota Yogyakarta, 2016/2017-2017-2018

Tingkat Pendidikan	Rasio Murid-guru		Rasio Murid-Kelas	
	2016/2017	2017/2018	2016/2017	2017/2018
SD	17	17	26	25
SMP	14	13	31	27
SMA	11	11	28	29

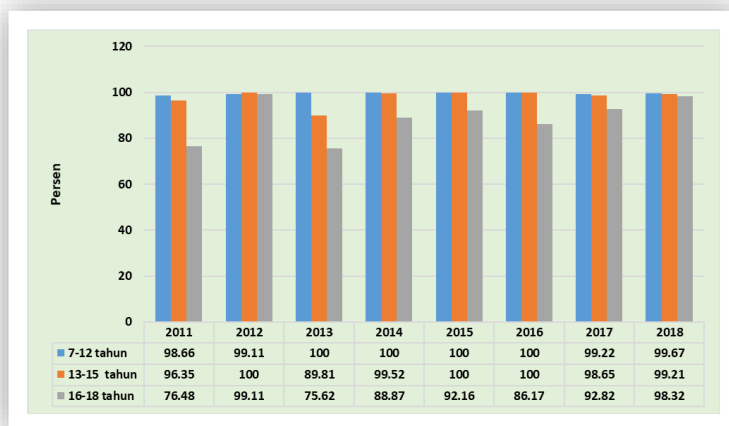
Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2018

Tidak hanya dari segi ketersediaan sekolah, fasilitas pendidikan yang juga menjadi perhatian bagi penunjang pendidikan adalah ketersediaan guru dan juga kelas. Untuk mengetahui gambaran mengenai kecukupan guru maupun kelas dapat dilihat dari angka rasio murid-guru dan rasio murid-kelas.

Hingga Tahun Ajaran 2017/2018 Rasio murid-guru di Kota Yogyakarta adalah 17 untuk SD, 13 untuk SMP, serta 11 untuk SMA. Sementara itu, di tahun sebelumnya, Rasio murid-guru untuk tahun ajaran 2016/2017 adalah 17 untuk SD, 14 untuk SMP, dan 11 untuk SMA. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari di tahun ini, rasio guru-murid tidak mengalami perubahan yang

signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hanya rasio SMP yang justru mengalami penurunan yaitu dari 14 menjadi 13.

Gambar 2.2 Angka Partisipasi Sekolah kota Yogyakarta tahun 2011-2018



Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2019

Kemudian untuk rasio murid-kelas di tahun 2016/2017 bagi SD adalah 26, 31 untuk SMP, serta 28 untuk SMA. Di tahun ajaran 2017/2018, rasio murid-kelas justru mengalami penurunan bagi tingkat SD dan juga SMP, yaitu 25 untuk SD dan 27 untuk SMP. Sebaliknya, rasio murid-kelas bagi tingkat SMA mengalami kenaikan yaitu menjadi 29.

Angka partisipasi sekolah (APS) di Kota Yogyakarta tahun 2018 terbilang cukup tinggi, dimana hampir mencapai 100 persen dari tiap rentang usia.

Angka partisipasi sekolah adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia

sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan menyenjam pendidikan. Meskipun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat mengeyam pendidikan.

Angka partisipasi sekolah (APS) di Kota Yogyakarta untuk anak usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun sebagaimana Gambar 7.1. Dari gambar memperlihatkan secara umum bahwa APS untuk umur 7-12 tahun, 13-15 tahun tahun 2014-2018 mendekati 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Kota Yogyakarta telah mampu mencapai program wajib belajar 9 tahun. Sedangkan untuk jenjang umur 16-18 tahun tahun 2013 hingga 2017 mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini berarti untuk rentang umur 16-18 pendidikan belum semua anak sekolah mengakses pendidikan di jenjang sekolah menengah pertama. Khusus untuk jenjang pendidikan SMA masih terdapat anak yang belum bersekolah pada jenjang usia 16-18 tahun. Ketiga rentang usia tersebut mampu mencapai angka tinggi dibandingkan dengan rentang usia 19-24 tahun yang hanya berkisar 63-69 persen. Dengan demikian, penduduk kota Yogyakarta dapat dikatakan memiliki kualitas pendidikan yang cukup baik.

2.4 Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor penting bagi kehidupan manusia. Kondisi kesehatan yang baik tentunya juga akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan, pemerintah Kota Yogyakarta telah

menyediakan fasilitas- fasilitas yang berkaitan dengan kesehatan. Kota Yogyakarta memiliki fasilitas kesehatan yang cukup banyak. Mulai dari infrastruktur kesehatan hingga tenaga kesehatan, telah banyak tersedia di Kota Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan itu sendiri. Tidak hanya dalam hal tindakan preventif seperti penyuluhan- penyuluhan tentang kesehatan, akan tetapi jumlah dan kualitas tenaga kesehatan di kota Yogyakarta juga menjadi penentu bagi terwujudnya masyarakat Kota Yogyakarta yang sehat.

Hingga tahun 2018, tercatat jumlah dokter mulai dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, hingga dokter gigi spesialis sebanyak 1664 dokter. Jumlah dokter tersebut tentunya ditunjang dengan tenaga kesehatan lain seperti bidan, perawat, maupun penyuluh kesehatan.

Tabel 2.4 Jumlah Dokter di Kota Yogyakarta Tahun 2019

Unit kerja	Dokter spesialis	Dokter umum	Dokter gigi	Dokter gigi spesialis
Puskesmas	0	77	32	1
Rumah sakit	669	268	112	52
Sarana kesehatan lain	31	301	65	56

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2019

2.5 Perekonomian

Untuk menggambarkan kondisi perekonomian di Kota Yogyakarta dapat digunakan PDRB atas dasar harga berlaku. Hal ini disebabkan karena PDRB sendiri dapat menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output pada suatu waktu tertentu. PDRB harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi, misalnya lapangan usaha yang ada di suatu

wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar.

Di Kota Yogyakarta sendiri distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usahanya memiliki presentase 3 terbesar pada sektor industri pengolahan, kemudian sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Informasi dan Komunikasi.

Sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum di Kota Yogyakarta menjadi sektor dengan persentase terbesar dalam distribusi PDRB di tahun 2015 hingga 2018. Hal ini berkaitan dengan posisi Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata sehingga sangat memungkinkan jika sektor tersebut memiliki persentase yang besar dibanding sektor lain.

Perekonomian di Kota Yogyakarta hingga tahun 2018 mengalami peningkatan. Apabila dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 hingga tahun 2015 perekonomian di kota Yogyakarta sempat mengalami penurunan. Akan tetapi untuk tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta mulai kembali naik secara bertahap hingga tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir kondisi perekonomian di Kota Yogyakarta terus bergerak ke arah yang lebih baik.

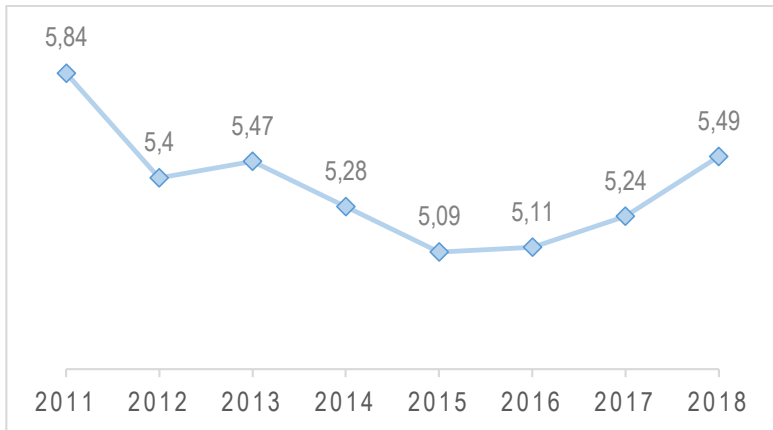
Tabel 2.5 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Lapangan usaha	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,16	0,15	0,15
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	13,66	13,71	13,47	13,26
Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,2	0,22	0,22

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	0,16	0,15	0,15	0,14
Konstruksi	7,96	7,84	7,74	7,93
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan sepeda motor	7,18	7,37	7,49	7,54
Transportasi dan Pergudangan	4,09	3,99	3,96	3,92
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,22	13,37	13,55	13,54
Informasi dan Komunikasi	10,33	10,38	10,45	10,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,68	6,7	6,65	6,71
Real Estate	9,32	9,22	9,1	9,09
Jasa Perusahaan	1,11	1,08	1,08	1,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib	10,01	10,18	10,42	10,31
Jasa Pendidikan	9,46	9,21	9,1	9,17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,79	3,76	3,78	3,79
Jasa lainnya	2,68	2,68	2,69	2,72

Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2019

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta Tahun 2011-2018



Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2018

Di tahun 2012 Kota Yogyakarta mengalami penurunan dan selanjutnya sempat mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi di tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 penurunan kembali terjadi. Meskipun demikian, tahun 2016 Yogyakarta berhasil menaikkan pertumbuhannya dari 5,11 kemudian menjadi 5,24 di tahun berikutnya hingga di tahun 2018 mencapai angka 5,49.

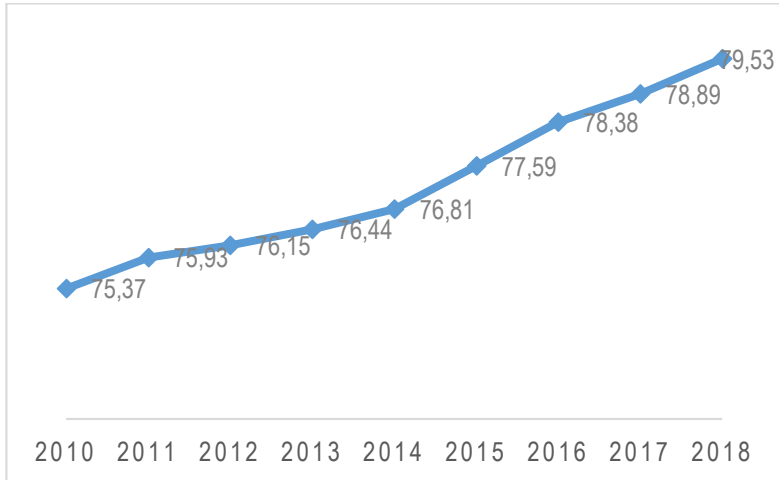
3 IPM Kota Yogyakarta

3.1 Perkembangan IPM Daerah Istimewa Yogyakarta

IPM merupakan nilai yang dapat merepresentasikan kondisi pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan. Terdapat beberapa komponen yang menjadi penyusun dalam IPM itu sendiri, antara lain komponen kesehatan, pendidikan, serta pendapatan. Komponen kesehatan dapat dilihat dari AHH, kemudian komponen pendidikan dilihat dari HLS (Harapan Lama Sekolah), serta RLS (Rata-rata Lama Sekolah), dan komponen pendapatan/daya beli yang disesuaikan dengan Pengeluaran perkapita riil.

Hingga tahun 2018 IPM Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami kenaikan dalam kurun waktu 8 tahun terakhir. Dari tahun 2010 IPM DIY terus mengalami peningkatan hingga tahun 2018. Dimulai dari angka 75,37 hingga mencapai 79,53. Meskipun kenaikan tidak terjadi secara signifikan, akan tetapi secara bertahap indeks pembangunan manusia di DIY mengalami perubahan yang lebih baik di setiap tahunnya.

Gambar 3.1 IPM DIY Tahun 2010-2018



Sumber: Diolah dari IPM DIY 2018

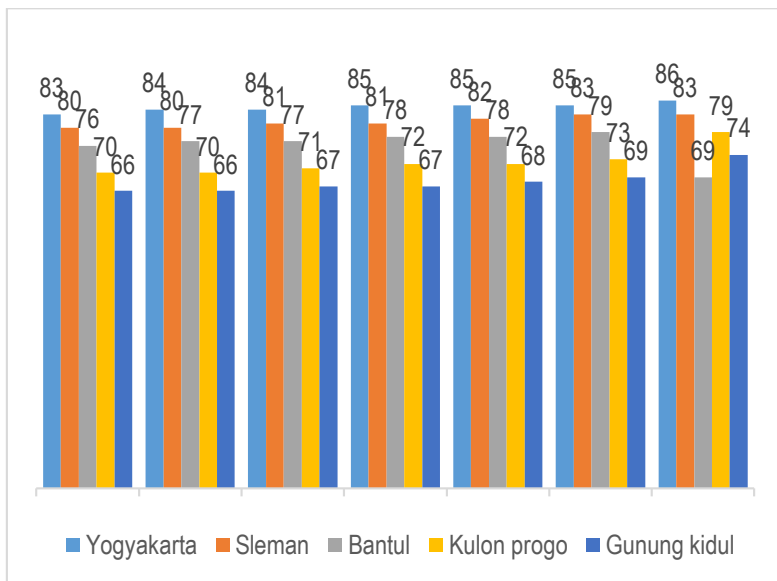
3.2 Perkembangan IPM Kota Yogyakarta

Perkembangan IPM di DIY terus mengalami kenaikan dari tahun 2010 hingga tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di DIY terus berubah ke arah yang lebih baik. Di Kota Yogyakarta sendiri, sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, perkembangan IPM juga mengarah kepada peningkatan.

Kota Yogyakarta mencapai indeks yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta. Fenomena ini terjadi secara terus menerus sejak tahun 2012 hingga tahun 2018. Namun, di tahun 2016 IPM Kota Yogyakarta sempat mengalami stagnansi, dimana angka indeks tidak mengalami perubahan dibanding dengan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, IPM Kota Yogyakarta tetap menjadi yang paling tinggi di antara kabupaten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup

penduduk di Kota Yogyakarta lebih baik dibanding dengan keempat kabupaten lain. Jika melihat klasifikasi indeks oleh UNDP, Kota Yogyakarta masuk dalam kelompok sangat tinggi, yaitu dengan angka di atas 80. Dalam 6 tahun terakhir, Kota Yogyakarta mendapat angka indeks di atas 80, yaitu 86,11 di tahun 2018. Di peringkat kedua, adalah Kabupaten Sleman, yang mendapat nilai indeks yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Selanjutnya disusul dengan Kabupaten Bantul, Kulon Progo, serta yang terakhir adalah Gunung Kidul.

Gambar 3.2 Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta (Persen) 2012-2018

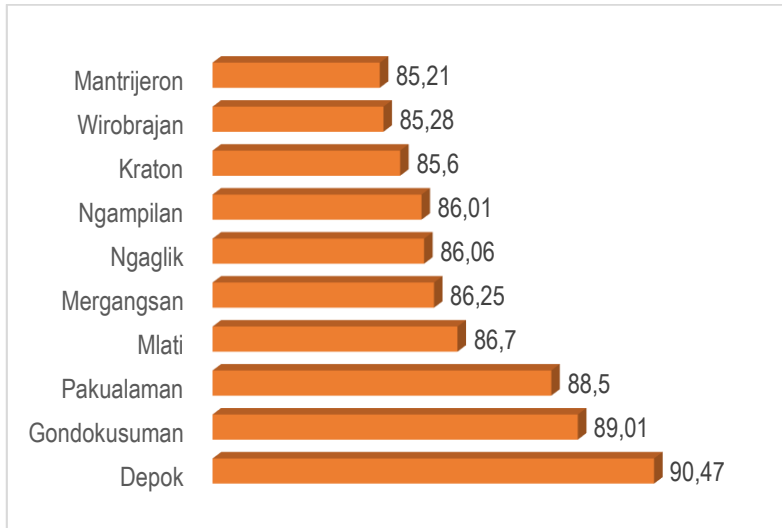


Sumber: Diolah dari Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2019

Kota Yogyakarta berhasil menempati posisi tertinggi dalam mencapai IPM di DIY. Akan tetapi, jika dilihat 10 besar angka IPM per-kecamatan di DIY, angka IPM tertinggi dicapai oleh Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Dari 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta, kecamatan dengan angka IPM tertinggi

adalah Kecamatan Gondokusuman, yaitu mencapai angka 89,01.

Gambar 3.3 10 besar IPM tertinggi kecamatan se-DIY tahun 2018

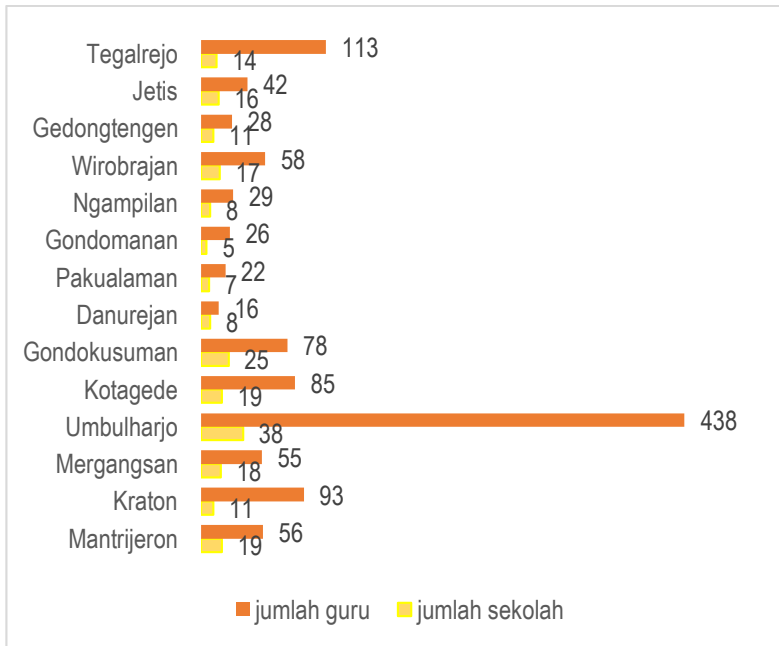


Sumber: Bappeda DIY 2018

Kecamatan Depok berada di peringkat pertama 10 besar IPM di DIY karena memiliki penyusun indeks yang cukup tinggi. Sementara itu, Kecamatan Gondokusuman sebagai salah satu kecamatan di Kota Yogyakarta memiliki angka IPM tertinggi kedua setelah Kecamatan Depok.

Apabila melihat angka penyusun IPM di Kecamatan Gondokusuman, faktor Pendidikan di kecamatan tersebut memiliki fasilitas yang cukup memadai dibanding dengan kecamatan lain. Kecamatan Gondokusuman memiliki fasilitas pendidikan yang terbanyak kedua di Kota Yogyakarta setelah Kecamatan Umbulharjo.

Gambar 3.4 Jumlah Sekolah dan Jumlah Guru per-Kecamatan tahun 2018



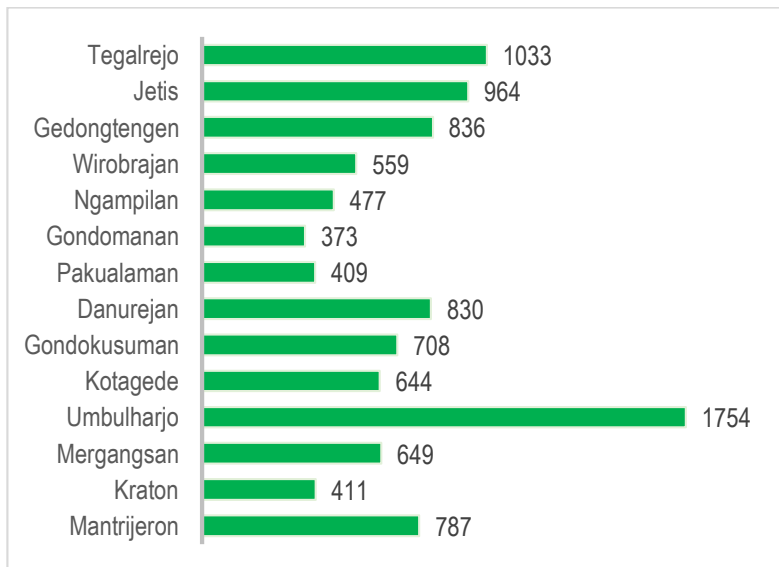
Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2018

Tahun 2018 jumlah sekolah di Kecamatan Gondokusuman adalah 25 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 78. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan di kecamatan tersebut cukup banyak dibandingkan dengan kecamatan lain. Kecamatan tersebut memiliki jumlah guru dan jumlah sekolah terbanyak ke-3 se-Kota Yogyakarta. Sedangkan jumlah sekolah terbanyak dimiliki Kecamatan Umbulharjo yaitu sebanyak 38 sekolah dengan jumlah guru yang juga terbanyak di Kota Yogyakarta yaitu 438 guru. Kondisi tersebut dapat mencerminkan bahwa dari segi jumlah ketersediaan fasilitas pendidikan di kecamatan-kecamatan tersebut lebih unggul dibanding kecamatan lainnya di Kota Yogyakarta, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pendidikan

masyarakatnya. Dengan demikian menjadi wajar jika dari komponen kesehatan, IPM di Kecamatan Gondokusuman maupun Umbulharjo mampu menempati posisi 10 besar tertinggi se-DIY di tahun 2018.

Dari segi kesehatan, masyarakat Kota Yogyakarta memiliki kesadaran kesehatan yang kurang, terutama berkaitan dengan penyakit yang berasal dari virus dan kuman serta hewan vektor yang mampu membawa penyakit. Seperti yang telah diketahui bahwa kebersihan merupakan faktor yang dapat menentukan kesehatan manusia. Jika seseorang memiliki perilaku hidup yang bersih dan sehat maka semakin jauh pula penyakit dari tubuhnya. Di Kota Yogyakarta tahun 2018 telah dilaporkan beberapa kasus penyakit seperti Kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB, dan Malaria.

Gambar 3.5 Sebaran Kasus HIV/AIDS, DBD, Diare, TB, dan Malaria menurut Kecamatan Kota Yogyakarta 2018



Sumber: Kota Yogyakarta dalam Angka 2019

Berdasarkan data tersebut jumlah sebaran penyakit HIV/AIDS, DBD, Diare, TB, dan Malaria di Kota Yogyakarta tahun 2018, terbanyak dialami di Kecamatan Umbulharjo. Dari berbagai kasus tersebut, kasus penyakit diare menjadi yang paling banyak dijumpai di wilayah Kota Yogyakarta. Sebagai kecamatan yang mencapai peringkat kedua dari 10 besar IPM se-DIY, Kecamatan Gondokusuman memiliki jumlah kasus penyakit-penyakit tersebut sebanyak 708, dimana Gondokusuman menempati peringkat ke-7 dari 14 kecamatan yang ada. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa penduduk di Kecamatan Gondokusuman memiliki kesadaran terhadap kesehatan dan kebersihan yang cukup baik dibanding dengan kecamatan lainnya.

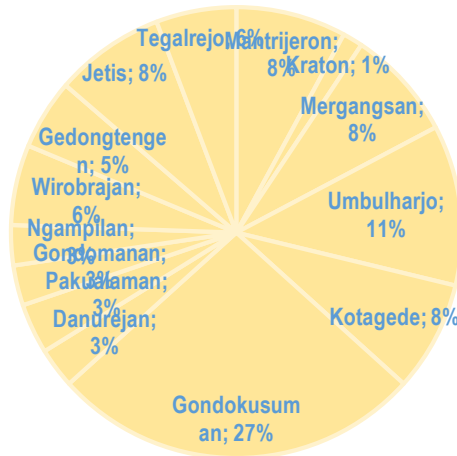
Selain dari faktor kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, faktor ketersediaan fasilitas kesehatan juga menjadi penentu terpenuhinya kebutuhan kesehatan penduduk. Persebaran fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta seperti Rumah sakit umum, Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan klinik/Balai kesehatan terbanyak berada di Kecamatan Gondokusuman.

Sebanyak 27 persen dari seluruh fasilitas kesehatan meliputi Rumah sakit umum, Puskesmas, Puskesmas pembantu, dan klinik/Balai kesehatan terbanyak dimiliki kecamatan Gondokusuman. Setelah itu diikuti oleh Kecamatan Umbulharjo dengan persentase 11 persen, dan kecamatan dengan persentase penyebaran fasilitas kesehatan paling sedikit berada di Kecamatan Kraton yaitu sebanyak 1 persen.

Dari segi ketersediaan fasilitas kesehatan di Kecamatan Gondokusuman, memiliki lebih banyak fasilitas dibandingkan dengan 13 Kecamatan lainnya yang ada di Kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah masyarakat di Gondokusuman untuk mengakses fasilitas kesehatan. Semakin mudah masyarakat mengakses maka akan semakin besar peluang masyarakat terjamin kesehatannya. Sehingga menjadi

mungkin jika masyarakat Gondokusuman masuk dalam daftar 10 besar IPM se-DIY.

Gambar 3.6 Persebaran Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Klinik/Balai Kesehatan di Kota Yogyakarta 2018



Sumber: Diolah dari Kota Yogyakarta dalam Angka 2019

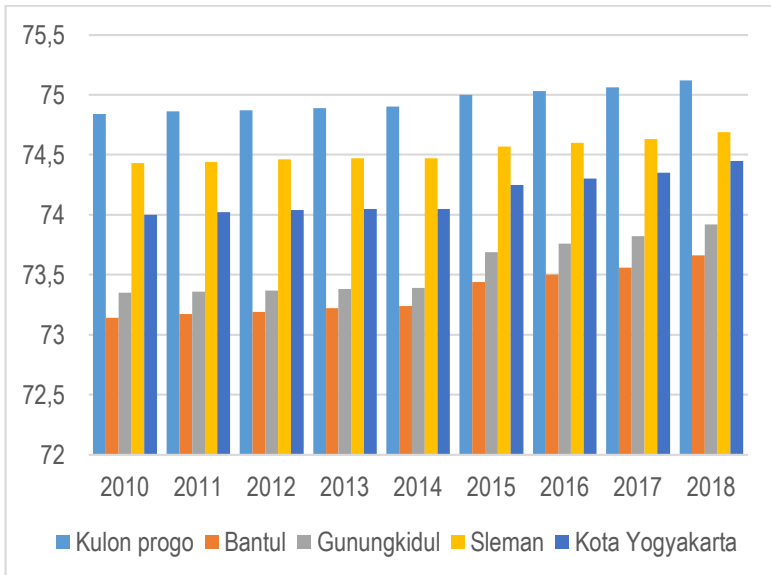
3.2.1 Komponen Kesehatan di Kota Yogyakarta

Sebagai salah satu komponen dalam penyusunan IPM, dalam komponen kesehatan Angka Harapan Hidup di Kota Yogyakarta hingga tahun 2018 rupanya mengalami kenaikan. Dari tahun 2010 hingga 2018 Yogyakarta hanya mengalami stagnansi di tahun 2014, yaitu sebesar 74.05 sama dengan angka yang dicapai di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2013.

Meskipun tidak memiliki angka tertinggi di DIY, akan tetapi angka harapan hidup saat lahir di kota Yogyakarta mengalami kenaikan dibanding dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2018, angka harapan hidup saat lahir di Kota Yogyakarta mencapai

angka 74,45, sementara di tahun 2017 sebesar 74,35. Angka tersebut dapat dikatakan cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman yang memiliki angka harapan hidup saat lahir tertinggi di provinsi DIY.

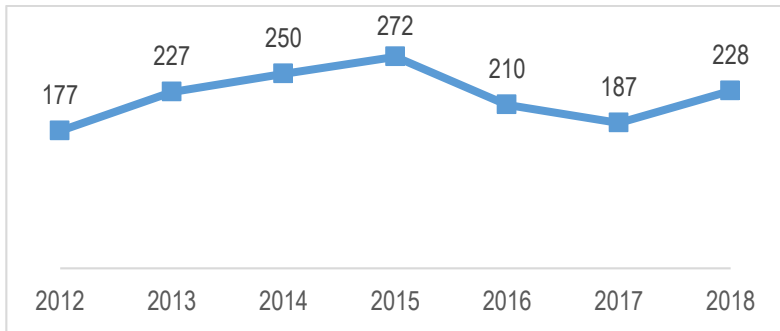
Gambar 3.7 Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup DIY



Sumber: BPS DIY Tahun 2019

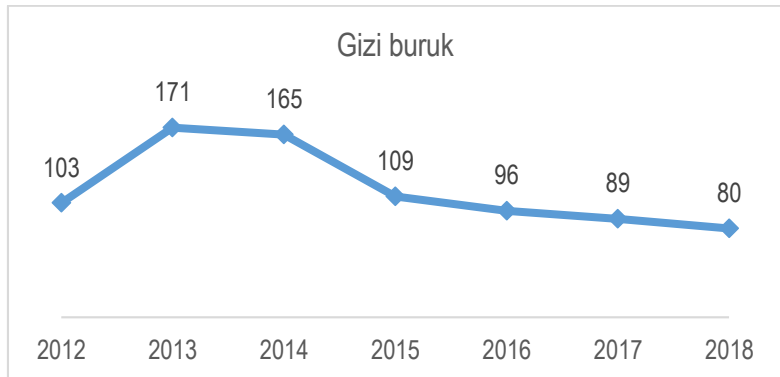
Kondisi tersebut berkaitan dengan kondisi kelahiran bayi di Kota Yogyakarta tahun 2018. Angka bayi yang memiliki berat badan bayi lahir rendah di tahun 2018 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Di tahun 2017, terdapat 187 bayi yang memiliki berat badan lahir rendah, yaitu sebanyak 187. Namun di tahun 2018 bayi yang memiliki berat badan lahir rendah bertambah menjadi 228. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas kesehatan ibu dan bayi di Kota Yogyakarta juga mengalami penurunan. Akan tetapi, angka bayi yang mengalami gizi buruk mengalami penurunan di tahun 2018.

Gambar 3.8 Perkembangan Angka Berat Badan Bayi Lahir Rendah Kota Yogyakarta 2012-2018



Sumber: kota Yogyakarta dalam Angka 2019

Gambar 3.9 Perkembangan Angka Bayi Gizi Buruk Kota Yogyakarta 2012-2018



Sumber: Kota Yogyakarta dalam angka 2019

Angka bayi yang mengalami gizi buruk di Kota Yogyakarta terus mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yaitu dari 89 menjadi 80. Menurunnya angka gizi buruk ini, menjadi pertanda bahwa Kota Yogyakarta telah berhasil memperbaiki kualitas gizi bayi di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan grafik perkembangan bayi di atas, dapat dikatakan bahwa angka harapan hidup di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan salah satunya akibat menurunnya angka gizi buruk serta berat badan lahir rendah di Kota Yogyakarta. Semakin terpenuhinya gizi bayi maka semakin besar peluang bayi lahir dengan sehat dan memiliki berat badan yang ideal. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta dalam penanganan masalah kualitas kelahiran telah mengalami perbaikan.

Naiknya angka harapan hidup saat lahir ini juga dipengaruhi oleh penyediaan fasilitas kesehatan yang terdapat di Kota Yogyakarta sendiri. Angka harapan hidup saat lahir berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat di suatu wilayah. Semakin sehat manusia, maka harapan hidup pun akan semakin lama. Dengan kata lain, semakin masyarakat memperhatikan kesehatan, maka semakin besar kemungkinan masyarakat dapat memiliki kualitas hidup yang baik. Kondisi kesehatan suatu masyarakat tentunya juga berkaitan erat dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada di suatu wilayah. Tersedianya fasilitas kesehatan yang mencukupi, memberi peluang yang besar bagi suatu wilayah untuk menjamin kesehatan masyarakatnya.

Tabel 3.1 Tabel Jumlah Fasilitas kesehatan DIY tahun 2018

Kabupaten/kota	Rumah sakit	RS Bersalin	Puskesmas	Puskestu/Puskesmas Keliling	Posyandu
Kulon progo	8	15	21	84	960
Bantul	17	14	27	94	1141
Gunung kidul	5	-	30	140	1468
Sleman	27	3	25	95	1530
Yogyakarta	21	11	18	27	621

Sumber: Statistik DIY 2019

Kota Yogyakarta memiliki angka harapan hidup yang lebih rendah dari Kabupaten Kulon Progo dan Sleman. Jika dibandingkan dengan keempat kabupaten lain di DIY, jumlah fasilitas kesehatan di Kota Yogyakarta tergolong masih sedikit, bahkan paling sedikit dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Sehingga dapat mempengaruhi posisi besarnya angka harapan hidup di kota dengan kabupaten lainnya di DIY.

Kondisi kesehatan penduduk Kota Yogyakarta yang baik tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa program pemerintah yang terkait dengan layanan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu program pemerintah di bidang kesehatan adalah BPJS. BPJS yang sudah diimplementasikan selama beberapa tahun terakhir memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Program serupa yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam hal kesehatan adalah Jamkesda. Menurut data terdapat 76,65 persen penduduk kota Yogyakarta yang sudah menggunakan Jaminan kesehatan untuk berobat. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Yogyakarta mampu mengakses bantuan kesehatan. Hal ini juga menunjukkan bahwa penduduk Kota Yogyakarta memiliki kesadaran dalam memperhatikan kesehatannya.

Tabel 3.2 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan, 2018

Jenis Kelamin	Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan
Laki-laki	77,71
Perempuan	75,78
Kota Yogyakarta	76,65

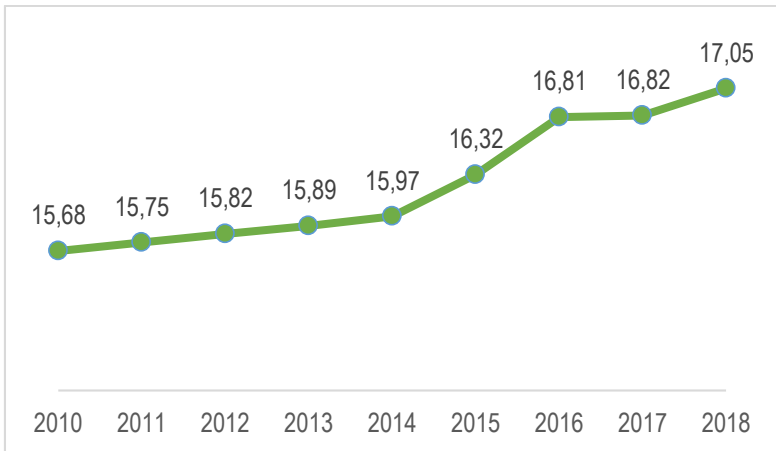
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2018

Bantuan- bantuan kesehatan telah memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, sehingga masyarakat lebih sejahtera dalam hal kesehatan. Hal inilah yang kemudian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal kesehatan.

3.2.2 Komponen Pendidikan di Kota Yogyakarta

Berkaitan dengan komponen pendidikan, dimensi pengetahuan, dapat dilihat dari dua aspek, antara lain Harapan Lama Sekolah (HLS) serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Di Kota Yogyakarta sejak tahun 2010, angka harapan lama sekolah terus mengalami peningkatan. Di tahun 2018 angka harapan lama sekolah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu dari 16,82 menjadi 17,05 tahun. Artinya harapan anak-anak yang berusia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan ialah 17,05 tahun.

Gambar 3.10 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kota Yogyakarta 2010-2018

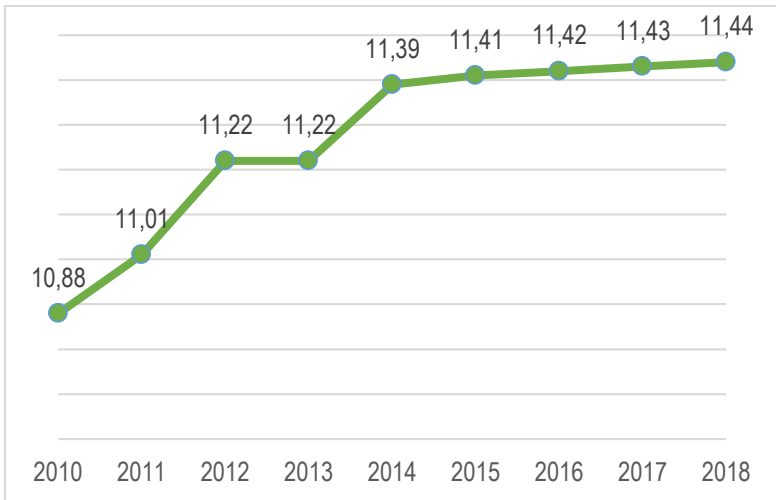


Sumber: Statistik DIY 2019

Sejak tahun 2010, angka harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Di tahun 2010, harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta adalah 15,68 tahun, sementara tahun 2018 kota Yogyakarta telah mencapai 17,05 tahun.

Meningkatnya angka harapan lama sekolah ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta juga terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Selain itu, harapan anak-anak di Kota Yogyakarta dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas tentunya semakin tinggi. Upaya – upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan juga telah dilakukan, sehingga dapat mendorong penambahan angka harapan lama sekolah di Kota Yogyakarta.

Gambar 3.11 Gambar Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Yogyakarta 2010-2018



Sumber: Statistik DIY 2019

Aspek kedua dalam penentuan komponen pendidikan dalam IPM di Kota Yogyakarta adalah rata-rata lama sekolah. Di tahun 2018, rata-rata lama sekolah juga mengalami peningkatan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Di tahun 2018 rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta mencapai 11,44 tahun, yang berarti bahwa rata-rata penduduk kota Yogyakarta menggunakan waktunya untuk menempuh pendidikan selama 11,44 tahun. Meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan, kenaikan angka rata-rata lama sekolah tersebut menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Jika dilihat peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Kota Yogyakarta hingga tahun 2018 telah mampu memberikan pelayanan pendidikan yang baik bagi masyarakat Kota Yogyakarta.

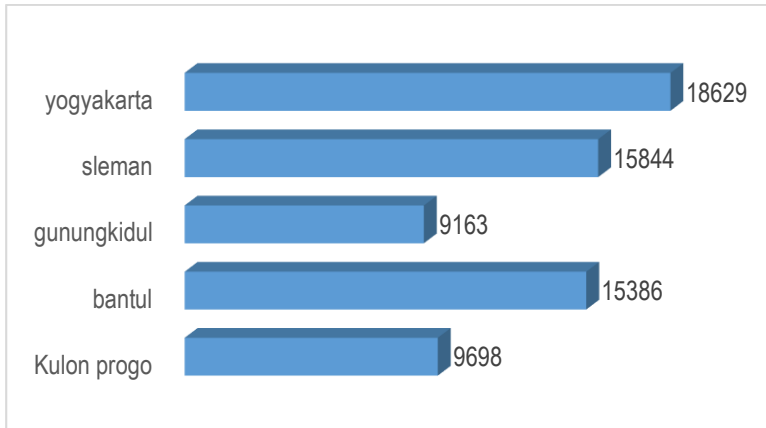
Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, serta kesadaran masyarakat dalam menempuh pendidikan menjadi pendorong bagi peningkatan kualitas pendidikan yang berimplikasi kepada angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta. Jika masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan dan didorong dengan tersedianya fasilitas yang memadai, membuat angka rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan.

Kondisi pendidikan yang baik ini juga didukung dengan beberapa program pemerintah yang telah diimplementasikan, seperti program BOS misalnya. Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Program BOS yang dilaksanakan di sekolah-sekolah di Indonesia, dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. Program tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang maksimal. Dari Dana BOS, beberapa biaya pendidikan dapat dicover sehingga dapat meringankan siswa untuk sekolah. Selain itu, dana BOS juga membantu dalam penyediaan fasilitas belajar seperti buku dan fasilitas sekolah lainnya.

3.2.3 Komponen Pengeluaran (Daya Beli)

Dalam mengukur indeks pendapatan telah dilakukan penyesuaian dengan menghitung pengeluaran (daya beli) masyarakat. Hal ini disebabkan karena penghitungan pengeluaran lebih mudah untuk dilakukan, dan dari sinilah akan terlihat seberapa besar kemampuan masyarakat untuk menjangkau kebutuhan atau melakukan aktivitas konsumsi.

Gambar 3.12 Pengeluaran Perkapita Riil Sebulan yang Disesuaikan (PPP) menurut Kabupaten/Kota di DIY 2018



Sumber: Statistik DIY 2019

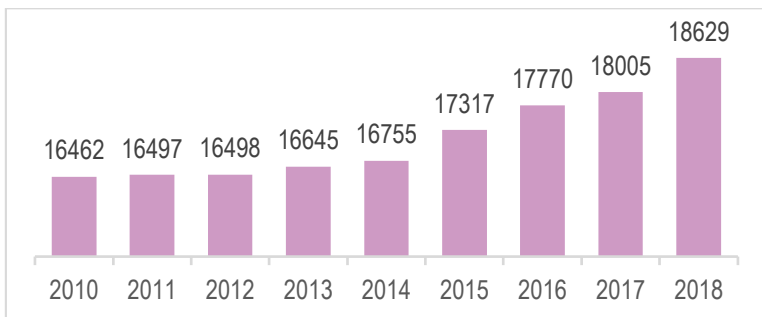
Sebagai wilayah dengan tipe perkotaan, tentunya membuat kondisi penduduk Kota Yogyakarta menjadi masyarakat yang konsumtif. Kemudahan dalam hal konsumsi juga mendorong masyarakat Kota Yogyakarta untuk membelanjakan uangnya. Kondisi seperti ini dapat dilihat dari rata-rata pengeluaran dari kabupaten lain di DIY, dimana Kota Yogyakarta memiliki rata-rata pengeluaran tertinggi. Banyaknya fasilitas dan kemudahan akses informasi membuat masyarakat Kota Yogyakarta untuk melakukan kegiatan konsumsi.

Apabila dibandingkan dengan keempat kabupaten lainnya, penduduk Kota Yogyakarta memiliki rata-rata tertinggi dalam hal pengeluaran. Di posisi kedua adalah Kabupaten Sleman dengan rata-rata sebesar 15.844 rupiah dan disusul dengan Kabupaten Bantul dengan angka 15.386 rupiah. Perbedaan yang sangat signifikan terlihat antara Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman dan Bantul dalam hal pengeluaran penduduknya. Hal ini menjadi lumrah ketika melihat kondisi

Kota Yogyakarta yang memiliki mobilitas tinggi, sebagai pusat aktifitas di DIY.

Sebagai kota dengan rata-rata pengeluaran tertinggi di DIY, Kota Yogyakarta sendiri memiliki rata-rata pengeluaran riil yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010 hingga tahun 2018.

Gambar 3.13 Pengeluaran Perkapita Riil Sebulan yang Disesuaikan (PPP) tahun 2010-2018 Kota Yogyakarta



Sumber: Statistik DIY 2019

Rata-rata pengeluaran di Kota Yogyakarta juga terus mengalami peningkatan sejak 2010. Di tahun 2018 rata-rata pengeluaran di Kota Yogyakarta adalah sebesar 18.629 rupiah. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2017 yaitu sebesar 18.005 rupiah.

Kenaikan rata-rata pengeluaran di Kota Yogyakarta tersebut menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya semakin meningkat. Hal ini juga berimplikasi terhadap daya beli masyarakat di kota Yogyakarta itu sendiri. Dengan demikian, pendapatan masyarakat di Kota Yogyakarta pun mengalami kenaikan, karena kemampuan daya beli masyarakat dari tahun ke tahun juga semakin meningkat.

3.3 Faktor Pendukung IPM

Dalam menentukan IPM, terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi perkembangan angka tersebut, antara lain seperti ketersediaan fasilitas, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan, hingga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Di Kota Yogyakarta sendiri, apabila melihat kondisi beberapa kecamatan yang ada, kecamatan yang menempati 10 besar tertinggi IPM di DIY tahun 2018 adalah kecamatan Gondokusuman dengan kondisi masyarakat yang memiliki kesadaran hidup bersih dan sehat serta ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang secara jumlah unggul dari kecamatan lain, ternyata cukup memberi pengaruh.

Masyarakat yang mudah dalam mengakses fasilitas kesehatan tentunya memiliki peluang yang besar dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Dengan demikian komponen kesehatan juga dapat terpenuhi dari sisi tersebut. Selain itu, masyarakat dengan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan kesehatan juga dapat menentukan kelangsungan hidupnya. Semakin sadar terhadap kesehatan maka semakin jauh dari penyakit, sehingga semakin besar peluang masyarakat untuk memiliki umur yang lebih panjang. Selain fasilitas kesehatan, ketersediaan fasilitas pendidikan juga dapat menunjang masyarakat dalam memperoleh akses pendidikan. Semakin banyak dan semakin mudah pendidikan diakses maka semakin tinggi pula peluang masyarakat untuk mengakses pendidikan.

Posisi Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata ternyata juga memberikan pengaruh terhadap perekonomian. Besarnya distribusi PDRB tahun 2018 dari sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki persentase yang besar dari lapangan usaha lainnya.

Kondisi Kota Yogyakarta sebagai ibukota provinsi yang memiliki fasilitas lengkap serta kepopuleran tempat wisata di

Kota Yogyakarta memberi peluang terhadap jenis usaha ini untuk mencapai persentase yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi wilayah dapat memberi dukungan terhadap perkembangan IPM di wilayah tersebut. Selain itu, hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa iklim usaha di bidang makan minum dan akomodasi sangat kuat di Kota Yogyakarta. Kondisi-kondisi tersebut memberikan dukungan terhadap perkembangan IPM di kota Yogyakarta itu sendiri.

4 Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Secara umum IPM di Kota Yogyakarta tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun lalu yaitu dari 85,49 menjadi 86,11, yang merupakan angka dalam kategori sangat tinggi dari klasifikasi IPM. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat di Kota Yogyakarta mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Dari segi kesehatan, masyarakat Kota Yogyakarta memiliki angka harapan hidup yang juga mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, yaitu dari angka 74,35 menjadi 74,45. Meskipun tidak mengalami perubahan yang signifikan, dapat dikatakan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Yogyakarta telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kemudian dari segi pendidikan, angka Harapan Lama sekolah yaitu 17,05 dan Rata-rata lama Sekolah sebesar 11,44 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Selaras dengan sektor kesehatan, sektor pendidikan juga menunjukkan bahwa masyarakat di Kota Yogyakarta terus mengalami peningkatan dari segi pendidikannya. Begitu juga dengan indikator pengeluaran atau daya beli masyarakat di Kota Yogyakarta yang juga mengalami kenaikan, dimana tahun ini rata-rata pengeluaran masyarakat mencapai 18.629 rupiah. Kemampuan daya beli masyarakat mencerminkan besarnya pendapatan masyarakat, sehingga naiknya angka pengeluaran dapat menunjukkan bahwa secara ekonomi, kondisi masyarakat Kota Yogyakarta mengalami perubahan yang lebih baik. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan IPM Kota Yogyakarta, perlu diperhatikan beberapa aspek

pendukung IPM. Misalnya seperti ketersediaan fasilitas kesehatan belum yang tersebar dengan rata di tiap kecamatannya, serta kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat Kota Yogyakarta belum optimal.

Peningkatan kualitas tenaga kesehatan juga menjadi penting untuk dilakukan agar dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan kesehatan itu sendiri. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat juga dapat dilakukan dengan memberikan tindakan preventif yang sifatnya edukatif seperti dilakukan penyuluhan mengenai PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di berbagai kalangan. Hal-hal mendasar mengenai penanaman kesadaran untuk hidup bersih dan sehat tentunya akan memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Yogyakarta.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah kesehatan Ibu hamil yang berpengaruh terhadap potensi Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR), dimana Kota Yogyakarta tahun ini mengalami kenaikan yang signifikan dari segi jumlah. Untuk menjamin bayi lahir dengan sehat dan berpeluang untuk meninggal, perlu diberikan edukasi terhadap para ibu hamil, mengenai aspek gizi selama kehamilan. Faktor tersebut menjadi penting karena kelahiran bayi dengan berat badan rendah harus ditekan agar potensi kelahiran bayi dengan kondisi sehat dapat diperbesar, sehingga angka harapan hidup masyarakat dapat meningkat.

Beberapa program kesehatan seperti Jamkesda, serta BPJS juga perlu diimplementasikan dengan optimal agar berbagai upaya diatas dapat terlaksana dengan baik. Pemberian bantuan kesehatan dapat sangat membantu masyarakat untuk mengakses kesehatan. Selain itu, terdapat bantuan lain yang dapat mendukung masyarakat untuk memperoleh kebutuhan yang layak, seperti Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu

Keluarga Sejahtera (KKS) serta Program Keluarga Harapan (PKH) dan KMS (Kartu Menuju sejahtera).

Hal serupa juga perlu dilakukan terhadap program-program bantuan pendidikan yang ada di Indonesia. Sebut saja BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang selama ini sudah dijalankan di level kabupaten maupun kota di Indonesia. Program bantuan pendidikan ini sangat berpengaruh terhadap rata-rata lama sekolah siswa. Dengan diberikannya bantuan, siswa dapat menempuh pendidikan, setidaknya wajib belajar 9 tahun dapat terpenuhi. Jika pemberian bantuan pendidikan dilakukan dengan optimal, tentunya akan membantu masyarakat yang merasa kesulitan dalam hal ekonomi untuk memperoleh pendidikan tinggi. Selain BOS, terdapat program lain yang dilakukan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh pendidikan, yaitu Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), dimana bantuan uang tunai secara langsung kepada anak-anak usia sekolah/siswa dari semua Jenjang Pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Program-program sejenis ini haruslah terus dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan juga menjadi penting untuk diperhatikan agar tujuan dari program tersebut dapat terwujud.

Pemberian bantuan pendidikan juga perlu dibarengi dengan penyediaan fasilitas sekolah yang memadai. Kualitas tenaga pendidik juga harus terus ditingkatkan, di samping pemerataan jumlahnya, agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Yogyakarta.

Perekonomian yang relatif mengalami peningkatan di Kota Yogyakarta harus terus didorong dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah dengan penguatan sektor pariwisata, mengingat besarnya persentase distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan

Usaha di tahun 2018 adalah dari jenis usaha akomodasi makan dan minum. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kota Yogyakarta masih terus memiliki minat yang tinggi. Perlu dilakukan penguatan sektor pariwisata dengan memaksimalkan kembali Pokdarwis (Kelompok sadar wisata) yang ada di Kota Yogyakarta. Keberadaan Pokdarwis ini tentunya akan semakin merangsang iklim usaha di kalangan masyarakat Kota Yogyakarta.

Jenis usaha industri pengolahan juga perlu mendapat penguatan karena persentase distribusi PDRB di Kota Yogyakarta terbesar kedua berasal dari jenis industri pengolahan. Pemberian dukungan terhadap UMKM tentunya juga dapat dilakukan sebagai salah satu jalan demi peningkatan perekonomian di Kota Yogyakarta. Dengan didorongnya kreatifitas masyarakat dalam hal industri pengolahan, akan semakin memicu peningkatan perekonomian.

Untuk mendukung penguatan sektor industri pemerintah telah mencoba untuk mencanangkan E-smart IKM. Melalui aplikasi ini para pengusaha dapat memperoleh kemudahan untuk melakukan pemasaran hingga pengelolaan keuangan. Hal ini perlu untuk disosialisaikan secara masif dan tentunya juga diterapkan, agar dapat mendorong iklim usaha di Kota Yogyakarta, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta.

Daftar Pustaka

- Mahi, Ali Kabul dan Sri Indra Trigunarso. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah* Teori dan Aplikasi. Jakarta: Kencana.
- Todaro, Michael p. Stephen c. Smith. 2006. *Pembangunan ekonomi* jilid 1 edisi kesembilan. Jakarta: Erlangga.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BPS. Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019.
- BPS. Kota Yogyakarta dalam Angka 2019.
- BPS. Indeks Pembangunan Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta 2018.
- BPS. Indeks Pembangunan Manusia (Metode baru) 2014.
- BPS. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2018.
- Bappeda DIY. Analisis Ipm Per Kecamatan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- UNDP.1990. *Human Development Report*.UNDP.New York.